



RENSTRA 2021 - 2026



Rencana Strategis
DINAS PERHUBUNGAN
Kabupaten Kepulauan Selayar
2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2021. Penyusunan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Benteng, 22 September 2021

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar,**

Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I.10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	II.1
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	II.22
2.2.1 Sumber Daya Manusi.....	II.22
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	II.25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	II.28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	II.43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar....	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III.3
3.2.1 Visi	III.3
3.2.2 Misi.....	III.4
3.2.3 Program Pembangunan Daerah.....	III.5
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.....	III.8
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan.....	III.8

3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	III.10
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	11
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	11
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	14
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	15
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	IV.1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII	P E N U T U P.....	VIII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	II.23
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan Tahun 2020	II.23
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	II.24
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2020	II.25
Tabel 2.5	Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2020	II.26
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	II.29
Tabel 2.7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II.31
Tabel 2.8	Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II.32
Tabel 2.9	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II.34
Tabel 2.10	Persentase Layanan Angkutan Darat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II.35
Tabel 2.11	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Darat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II.36
Tabel 2.12	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II.37
Tabel 2.13	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.....	II.37
Tabel 2.14	Rasio Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	II.38
Tabel 2.15	Rasio Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.....	II.39
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	II.42
Tabel 2.17	Kebutuhan Pelayanan dan Arahkan Lokasi Pengembangan berdasarkan telaahan Kementerian Perhubungan	II.51

Tabel 2.18	Kebutuhan Pelayanan dan Arahan Lokasi Pengembangan berdasarkan telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	II.52
Tabel 2.19	Kebutuhan Pelayanan dan Arahan Lokasi Pengembangan berdasarkan telaahan RTRW	II.53
Tabel 2.20	Kebutuhan Pelayanan dan Arahan Lokasi Pengembangan berdasarkan telaahan KLHS.....	II.53
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar....	III.2
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.13
Tabel 3.3	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD.....	III.14
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .	III. Error! Bookmark not defined.5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	IV.3
Tabel 5.1	Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan	V.4
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.6
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	VI.2
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	VI.88
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.2
Tabel 7.2	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs	VII.3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	II.21
Gambar 2.2 Grafik Capaian Kinerja Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Pada Tahun 2016-2020	II.32
Gambar 2.3 Grafik Capaian Kinerja Rasio Ijin Trayek Pada Tahun 2016-2020	II.33
Gambar 2.4 Grafik Capaian Kinerja Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Pada Tahun 2016-2020	II.34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun.

Seiring dengan ditetapkannya kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari 2021, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional (UU Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2007 Tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, maka secara sinergi pula Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para *stake holders*.

Penyusunan Renstra memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai dasar untuk menetapkan

lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dan KLHS menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana atau program agar dampak dan/atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang perhubungan. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang maju dan sejahtera tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Transportasi memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategik dalam Pembangunan Daerah. Transportasi berperan sebagai penggerak dan pendorong dalam memperlancar roda kegiatan perekonomian serta berperan penting dalam produksi, distribusi, dan arus pergerakan penumpang dan jasa ke seluruh pelosok wilayah.

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Government*). Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 185);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi

- Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 disusun menurut sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar; Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan Isu-isu strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat uraian terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat penjabaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Perhubungan bersama Kepala BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Angkutan.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Keselamatan.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis di bidang perhubungan;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- h. Melaksanakan evaluasi pelaporan daerah di bidang perhubungan;
- i. Menyelenggarakan administrasi di bidang perhubungan;
- j. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan;
- k. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan teknis prasarana dan keselamatan;
- l. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Sekretaris, yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset dan dokumentasi;

- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian Program meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- g) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- h) menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
- i) menyusun dokumen evaluasi dinas;
- j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
- k) memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang perhubungan;
- l) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas;
- m) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan,

kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h) melakukan pengelolaan asset, perlengkapan dan rumah tangga;
- i) mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j) melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k) melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l) melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitas, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n) melakukan kebijakan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas;
- o) memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;

- p) memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
- q) melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
- r) melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
- s) melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
- t) memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- u) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h) melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i) melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- j) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- k) menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l) menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
- m) menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi tiga seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dan Seksi Angkutan dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas. Uraian Tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas;

- g) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas;
 - h) melakukan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten;
 - i) menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
 - j) melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
 - k) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas;
 - l) menyiapkan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
 - m) melakukan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - n) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - o) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - p) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q) menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
 - r) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas. Uraian Tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas:

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan rekomendasi analisis dampak lalu lintas;
- g) melakukan kajian analisis dampak lalu lintas terhadap bahaya polusi udara dan gangguan kebisingan;
- h) menyiapkan perencanaan, pengaturan dan pengawasan dengan unit kerja terkait dalam rangka rencana analisis dampak lalu lintas;
- i) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka pengendalian analisis dampak lalu lintas;
- j) menyiapkan bahan rekomendasi dan rencana implementasi penanganan analisis dampak lalu lintas;
- k) melakukan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- l) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang analisis dampak lalu lintas;
- m) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dan memberikan saran

pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Angkutan. Uraian tugas Seksi Angkutan:

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Angkutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah;
- g) melakukan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
- h) melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek;
- i) melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
- j) melakukan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang;
- k) melakukan pembinaan bagi pengusaha angkutan darat dan sopir angkutan darat;
- l) memberikan rekomendasi terhadap pengoperasian bus;
- m) melakukan pengawasan dan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;

- n) menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- o) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang angkutan;
- p) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana dan Keselamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan keselamatan. Untuk melaksanakan tugas yang diemban Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan keselamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana dan keselamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang prasarana dan keselamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi tiga seksi yaitu :

1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan dan Pembangunan Prasarana. Uraian Tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan penetapan rencana induk daerah lingkungan kerja / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan punggungan lokal;
- g) melakukan fasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan punggungan lokal;
- h) melakukan pembangunan dan fasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan, pengerukan di wilayah perairan pelabuhan punggungan lokal;
- i) melakukan fasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan punggungan lokal;

- j) melakukan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- k) membuat data base sarana dan prasarana perhubungan;
- l) melakukan pengadaan dan pemasangan, pengelolaan serta pemeliharaan area traffic control system;
- m) melakukan analisis perencanaan sarana dan prasarana;
- n) melakukan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
- o) melakukan penyediaan rambu-rambu lalu lintas angkutan dan penyeberangan dalam wilayah daerah;
- p) mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana;
- q) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s) menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengoperasian Prasarana;

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengoperasian Prasarana. Uraian tugas Seksi Pengoperasian Prasarana, meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengoperasian Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau, menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- g) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- h) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- i) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (Dua Puluh Empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- j) melakukan fasilitas kajian rekomendasi penertiban izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan) pelabuhan pengumpan lokal;
- k) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian prasarana;
- l) melakukan pengelolaan operasional sarana;
- m) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan operasional prasarana;
- n) melakukan pemantauan / pengawasan terhadap pengoperasian sarana perhubungan;
- o) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
- p) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

- q) menilai kinerja pegawai negeri sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- r) menyusun laporan pelaksanaan Tugas kepada Seksi Pengoperasian Prasarana dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengembangan dan Keselamatan.

Seksi Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan dan Keselamatan. Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Keselamatan meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Keselamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan dan Keselamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan laik jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- g) melakukan Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pepaduan moda transportasi;
- h) menyiapkan fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;
- i) melakukan fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;

- j) melakukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- k) melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau yang menjadi isu kota;
- l) melakukan bimbingan keselamatan dan ketertiban serta analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- m) menyusun Sistem Informasi Manajemen transportasi perkotaan;
- n) menyusun dan mengembangkan perencanaan dan pembangunan transportasi;
- o) melaksanakan penegakan hukum oleh PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- p) melakukan pengaturan, pengawasan dan penetapan jaringan trayek jalan untuk kendaraan penumpang dalam kota serta wilayah angkutan barang lokal;
- q) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan;
- r) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s) menilai kinerja pegawai negeri sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- t) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Keselamatan pada dan memberi saran kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rancangan kebijakan teknis,

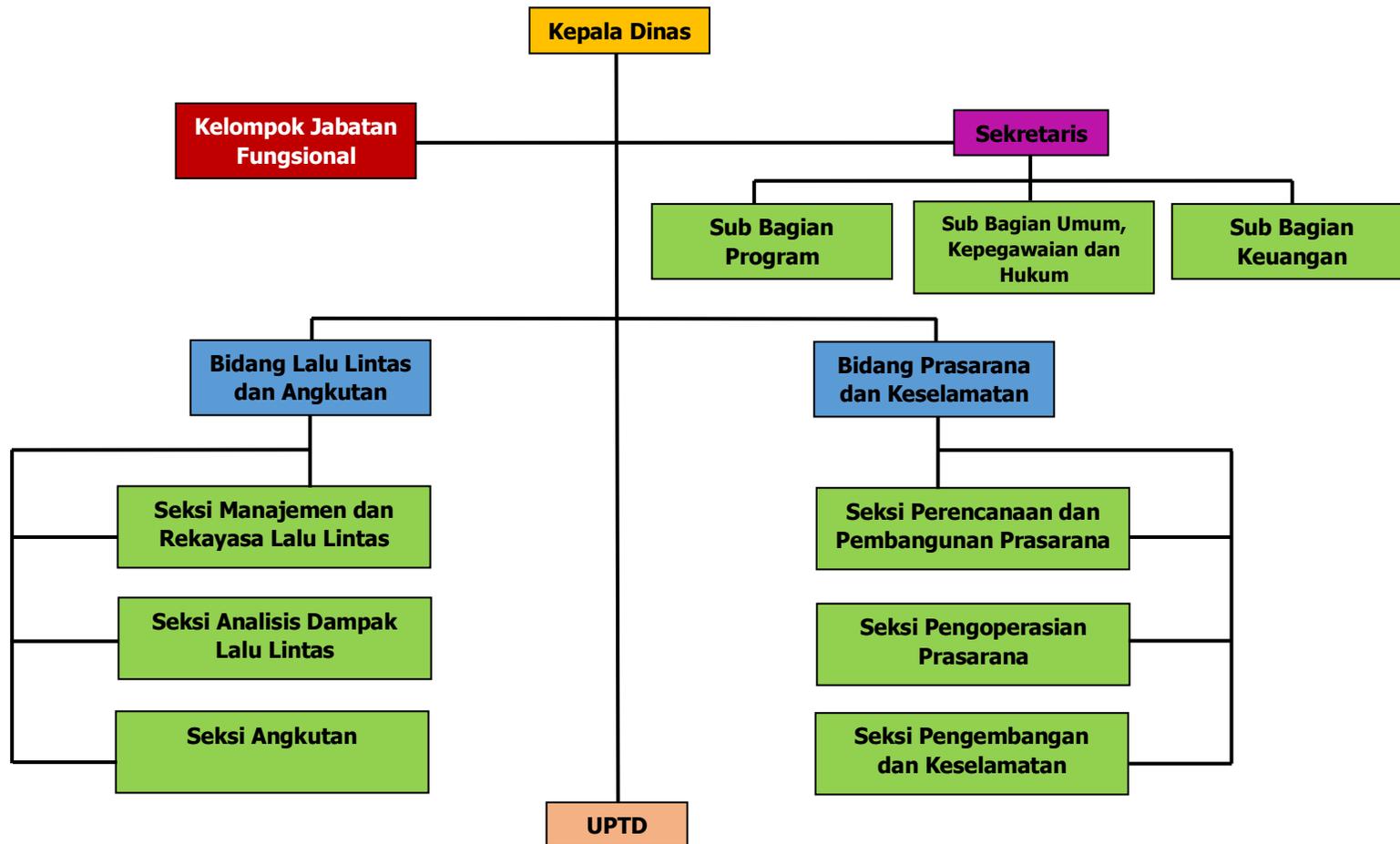
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian di bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas yang diembannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan yang terdapat dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Pelayanan fasilitasi pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dinas Perhubungan membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas antara lain :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
 (Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020)

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya seperti tanah, peralatan/perlengkapan/aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya – sumber daya lainnya. Sumber Daya Manusia terdiri dari atas dua yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Golongan Ruang.

Pada Tahun 2020 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Perhubungan sebanyak 64 orang. Adapun jumlah dan komposisi PNS, PTT dan Tenaga Sukarela seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	IV	3	-	3	
2.	III	27	12	39	
3.	II	19	3	22	
4.	I	-	-	-	
5.	PTT	73	43	116	
6.	Sukarela	6	3	9	
Total		128	61	189	

2. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Kepangkatan.

Pada Tahun 2020 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Kepangkatan didominasi oleh Pangkat Pengatur Tk. I. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
 Menurut Kepangkatan Tahun 2020**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	Pembina Utama Muda	1	-	1	
2.	Pembina Tk. I	1	-	1	
3.	Pembina	3	-	3	
4.	Penata Tk. I	6	2	8	
5.	Penata	4	4	8	
6.	Penata Muda Tk. I	4	10	14	
7.	Penata Muda	4	3	7	
8.	Pengatur Tk. I	12	-	12	
9.	Pengatur	5	-	5	
10.	Pengatur Muda Tk. I	1	1	2	
11.	Pengatur Muda	-	-	-	
Total		41	20	61	

3. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut tingkat Pendidikan.

Pada Tahun 2020 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Kepangkatan didominasi oleh Tingkat Pendidikan SLTA. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai								Ket
		PNS		PTT		Sukarela		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	S2	2	2	-	-	-	-	2	2	
2.	S1	16	9	17	7	-	1	33	17	
3.	D3	11	1	9	8	-	1	20	10	
4.	SLTA	17	2	47	34	8	5	72	41	
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		46	14	73	49	8	7	127	70	

4. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang menduduki jabatan Eselon.

Pada Tahun 2020 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag/Kepala UPTD). Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2020

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1.	Eselon IIB (Kepala Dinas	1	-	
2.	Eselon IIIA (Sekretaris)	1	-	
3.	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	3	1	
4.	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	13	6	
5.	Eselon IVB (Kasubag. TU)	4	-	
Total		22	7	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
**Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
sampai dengan Tahun 2020**

No.	Jenis Aset	Volume		Keterangan
1	2	3		4
1	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	348	m ²	Jl. Jammeng, Kab. Kepulauan Selayar
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	483	m ²	Jl. R.E. Martadinata Kelurahan Benteng
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	6166	m ²	Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng
4	Rumah Singgah	1	Unit	Baik
5	Bangunan Gedung Kantor	6	Unit	Baik
6	Sepeda Motor	32	Unit	Baik
7	Mobil	8	Unit	Baik
8	Bus	1	Unit	Baik
9	Kapal Motor	2	Unit	Baik
10	Meja ½ Biro	5	Buah	Baik
11	Meja Tamu	4	Buah	Baik
12	Meja Rapat	2	Buah	Baik
13	Meja Kerja Pejabat	4	Buah	Baik
13	Meja Kerja Kayu	18	Buah	Baik
14	Meja Kerja Besi / Metal	2	Buah	Baik
15	Meja Komputer	3	Buah	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat	17	Buah	Baik
17	Kursi Tamu	8	Buah	Baik
18	Kursi Rapat	3	Buah	Baik
19	Kursi Putar	5	Buah	Baik
20	Kursi Lipat	9	Buah	Baik
21	Kursi Plastik	1	Buah	Baik
22	Kursi Besi / Metal	1	Buah	Baik
23	Bangku Tunggu	1	Buah	Baik
24	Sofa	1	Buah	Baik
25	Lemari Kayu	4	Buah	Baik
26	Lemari Besi / Metal	5	Buah	Baik
27	Lemari Kaca	2	Buah	Baik
28	Lemari Sorok	2	Buah	Baik
29	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Buah	Baik
30	Rak Besi	1	Buah	Baik
31	Filling Cabinet Besi	11	Buah	Baik
32	Brandkas	1	Buah	Baik
33	AC	12	Unit	Baik
34	Sound System	3	Unit	Baik
35	Faximile	2	Unit	Baik

36	Mesin Potong Rumput	3	Unit	Baik
37	Unit Tranceiver SSB Portable	3	Unit	Baik
38	TV	6	Unit	Baik
39	Komputer PC	13	Unit	Baik
40	Printer	31	Unit	Baik
41	UPS	4	Unit	Baik
42	Camera Digital	8	Unit	Baik
43	Handy Talky	38	Unit	Baik
44	Laptop	32	Unit	Baik
45	Buffet Kayu	1	Buah	Baik
46	Buffet Kaca	1	Buah	Baik
47	Lampu Sorot Putar		Buah	
48	Tempat Tidur	1	Buah	Baik
49	Note Book	3	Unit	Baik
50	Hard Disk	1	Unit	Baik
51	Stavolt		Unit	
52	Mesin Pompa Air	1	Unit	Baik
53	Traffic Light	1	Buah	Baik
54	VHF	1	Unit	Baik
55	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	2	Unit	Baik
56	Proyektor	2	Unit	Baik
57	Viewer	1	Unit	Baik
58	Handycam		Unit	
59	CCTV	1	Unit	Baik
60	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
61	GPS	1	Unit	Baik
62	Server	1	Unit	Baik
63	Lemari Es	3	Unit	Baik
64	Dispenser	3	Unit	Baik
65	Jam Elektronik & Mekanis	2	Unit	Baik
66	Generator Set / MB (Besi)	1		
67	Mesin Ketik Manual Portable	2	Unit	Baik
68	Alat Pemadam	1	Unit	Baik
69	Alat Dapur	4	Unit	Baik
70	Alat Rumah Tangga Lainnya	71	Unit	Baik
71	Alat Keamanan Lainnya	4	Unit	Baik
72	Target Drone	10	Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan merencanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jangka waktu lima tahun sebelumnya. Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang direncanakan terdapat berbagai kendala dengan pendanaan yang terbatas oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung terwujudnya program pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.6** dan Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada **Tabel 2.16**.

Tabel 2.6
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
7.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum				63.000	76.000	89.000	103.000	105.000	26.968	78.866	112.799	122.736	70.378	0,39	1,03	1,26	1,19	0,67
7.2	Rasio Ijin Trayek				0,0963	0,0996	0,1027	0,1059	0,1091	0,001	0,001	0,001	0,001	0	0,010	0,010	0,009	0,009	0
7.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum				163	163	170	175	180	79	98	100	102	102	0,48	0,60	0,58	0,58	0,56
7.4	Jumlah Bandara				1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Jumlah Dermaga Penyeberangan				2	3	3	3	4	2	2	2	2	2	1	0,66	0,66	0,66	0,5
	Jumlah Pelabuhan Strategis				3	4	5	6	7	1	7	7	7	7	0,33	1,75	1,4	1,16	1
	Jumlah Terminal Bus				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.5	Jumlah Layanan Angkutan Darat				7.500	8.000	8.500	9.000	10.000	8.297	10.037	11.432	13.374	15.070	1,10	1,25	1,34	1,48	1,50
7.6	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum				160	200	240	280	320	270	181	210	222	152	1,68	0,90	0,87	0,79	0,47
7.7	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)				6 jam	6 jam	6 jam	6 jam	6 jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
7.8	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum				64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	1	1	1	1	1
7.9	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Terpasang (Pemasangan Rambu-Rambu)				150	160	200	250	300	117	147	212	336	551	0,78	0,91	1.06	1,34	1,83
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR																			
1	Perhubungan																		
1.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan				0,54	0,56	0,58	0,60	0,53	0,54	0,56	0,58	0,60	0,53	1	1	1	1	1
1.2	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum				6.235	54.378	77.115	77.220	40.476	6.235	54.378	77.115	77.220	40.476	1	1	1	1	1
1.3	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun				23.752	41.189	60.000	64.714	24.761	23.752	41.189	60.000	64.714	24.761	1	1	1	1	1

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas, adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami kenaikan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2016 sebesar 26.968 hingga tahun 2019 mencapai sebesar 122.736 penumpang. Namun Arus penumpang mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 70.378 penumpang. Hal ini disebabkan masa pandemi yang menyebabkan mobilitas penumpang juga mengalami pembatasan. Secara umum tren peningkatan ini dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih menjadikan angkutan umum sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Namun untuk angkutan pedesaan masih kurangnya armada angkutan umum yang melayani hingga pedesaan yang disebabkan oleh masih banyaknya ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum dan kurangnya pengusaha angkutan pedesaan. Pada **Tabel 2.7** dan **Gambar 2.2** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah Arus Penumpang Umum.

Tabel 2.7
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	675	1.253	2.853	3.296	1.218
2	Pasilambena	415	1.215	3.359	3.512	1.318
3	Pasimasunggu	689	1.636	3.834	4.284	1.523
4	Taka Bonerate	525	1.087	3.208	3.580	1.105
5	Pasimasunggu Timur	365	986	2.054	2.874	975
6	Bontosikuyu	1.535	9.827	11.952	12.108	5.693
7	Bontoharu	1.698	7.785	9.875	9.875	4.963
8	Benteng	13.993	25.385	43.375	45.519	31.179
9	Bontomanai	1.385	10.013	10.354	11.391	5.662
10	Bontomatene	4.413	11.734	12.713	14.089	8.935
11	Buki	1.275	7.945	9.222	11.208	7.807
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		26.968	78.866	112.799	121.736	70.378



Gambar 2.2

Grafik Capaian Kinerja Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Pada Tahun 2016-2020

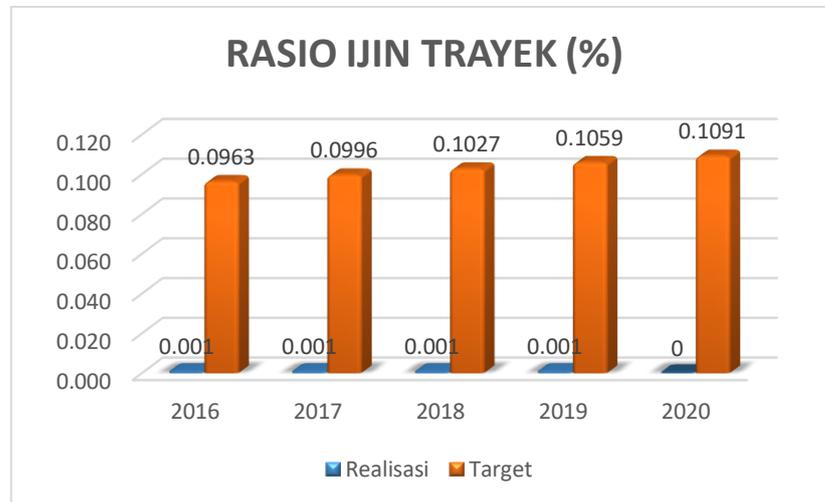
2. Rasio Ijin Trayek

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Rasio Ijin Trayek tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jika melihat kecenderungan kenaikan penumpang naik, tetapi rasio ijin trayek yang dikeluarkan tidak mengalami peningkatan. Ini menunjukkan tidak terdapat penambahan jumlah armada angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar juga disebabkan maraknya angkutan umum yang berplat hitam (angkutan travel). Pada **Tabel 2.8** dan **Gambar 2.3** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Rasio Ijin Trayek.

Tabel 2.8
Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka Bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
7	Bontoharu	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
8	Benteng	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Bontomanai	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
10	Bontomatene	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
11	Buki	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0
Rasio Ujin Trayek		0,001	0,001	0,001	0,001	0,000



Gambar 2.3

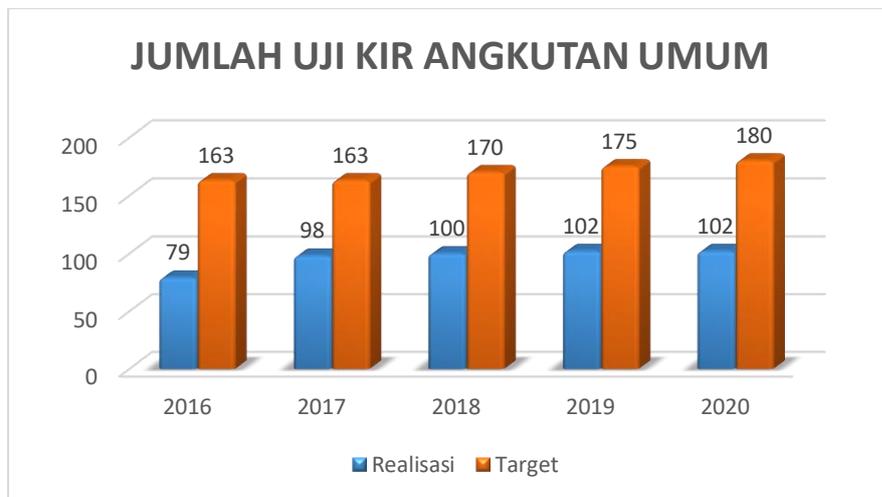
Grafik Capaian Kinerja Rasio Ijin Trayek Pada Tahun 2016-2020

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum. Pada tahun 2016 jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 79 kendaraan dan pada tahun 2020 jumlah uji KIR kendaraan umum sebanyak 102 kendaraan. Jumlah uji KIR angkutan umum yang peningkatannya masih sangat rendah setiap tahunnya akibat dari fasilitas pengujian kendaraan yang belum memadai sehingga pemilik kendaraan cenderung melakukan uji kendaraan di luar Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mengatasi hal tersebut maka perlunya pengadaan balai uji dan alat uji kendaraan yang memadai. Pada **Tabel 2.9** dan **Gambar 2.4** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah Uji KIR Angkutan Umum.

Tabel 2.9
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka Bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	13	15	15	15	15
7	Bontoharu	10	10	10	10	10
8	Benteng	26	35	37	39	39
9	Bontomanai	7	11	11	11	11
10	Bontomatene	15	17	17	17	17
11	Buki	8	10	10	10	10
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		79	98	100	102	102



Gambar 2.4
Grafik Capaian Kinerja Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Pada Tahun 2016-2020

4. Jumlah Pelabuhan Laut / Ferry / Bandara / Terminal Bus

Jumlah pelabuhan penyeberangan yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas penyeberangan terutama di wilayah kepulauan sedangkan Jumlah penumpang yang semakin meningkat dan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di tahun 2006 sampai tahun 2019 sehingga dibutuhkan

adanya pembangunan pelabuhan penyeberangan pada wilayah kepulauan. Untuk itu direncanakan akan dibangun pelabuhan laut di tahun 2020 sebanyak 4 buah tetapi hal ini tidak terwujud karena memerlukan perencanaan dokumen koordinasi-koordinasi yang lebih intensif untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut.

5. Jumlah Layanan Angkutan Darat

Jumlah layanan angkutan darat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah. Ini menunjukkan jumlah angkutan darat yang tersedia masih sedikit dibandingkan jumlah penumpang angkutan darat yang akan terangkut yang semakin meningkat. Data tahun 2016 jumlah layanan angkutan darat sebesar 8.297 dan tahun 2020 sebesar 15.070. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang belum mencukupi panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga sangat diharapkan adanya pemasangan rambu lalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Pada **Tabel 2.10** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Persentase Angkutan Darat.

Tabel 2.10
Persentase Layanan Angkutan Darat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	50	39,56	36,87	36,87	36,87
2	Pasilambena	50	49,53	47,49	47,49	47,49
3	Pasimasunggu	50	40,31	43,54	43,54	43,54
4	Taka Bonerate	50	49,75	48,68	48,68	48,68
5	Pasimasunggu Timur	50	47,21	45,30	45,30	45,30
6	Bontosikuyu	46,72	43,20	44,31	44,31	44,31
7	Bontoharu	49,03	42,32	41,35	41,35	41,35
8	Benteng	34,31	58,81	29,95	41,12	41,12
9	Bontomanai	49,16	45,93	45,78	45,78	45,78
10	Bontomatene	48,16	49,48	42,75	42,75	42,75
11	Buki	49,25	47,06	46,26	46,26	46,26
	Persentase Layanan Angkutan Darat	38,24	34,04	61,02	54,24	

6. Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Jumlah kepemilikan KIR di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dibawah 50 persen dari jumlah angkutan umum yang wajib

KIR. Ini menunjukkan masih kurangnya pengusaha angkutan darat untuk mengurus KIR kendaraannya tiap tahun. Hal ini juga disebabkan kurang memadainya peralatan uji KIR. Data tahun 2016 menunjukkan kumulatif kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 270 dan menurun pada tahun 2020 sebanyak 152. Pada **Tabel 2.11** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Darat.

Tabel 2.11
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Darat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka Bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	8,61	9,93	9,93	9,93	9,93
7	Bontoharu	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
8	Benteng	17,22	23,18	24,50	25,83	25,83
9	Bontomanai	4,64	7,28	7,28	7,28	7,28
10	Bontomatene	9,93	11,26	11,26	11,26	11,26
11	Buki	5,30	6,62	6,62	6,62	6,62
Persentase Kepemilikan KIR		52,32	64,90	66,23	67,55	67,55

7. Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Jumlah rambu-rambu lalu lintas (petunjuk jalan, keselamatan) serta perlengkapan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sebanyak 117 unit dan mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebanyak 551 unit. Hal ini disebabkan adanya kontribusi anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan tersebut, baik melalui anggaran Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Pada **Tabel 2.12** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu.

Tabel 2.12
**Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka Bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	50	85	100	100	100
7	Bontoharu	50	80	85	100	100
8	Benteng	86	141	141	151	151
9	Bontomanai	50	75	100	100	100
10	Bontomatene	50	95	100	100	100
11	Buki	50	75	75	100	100
Pemasangan Rambu-Rambu		336	551	601	651	651

8. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 mengalami penurunan sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan semakin meningkat tidak diiringi dengan penambahan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 sebesar 0,54 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,53. Pada **Tabel 2.13** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan.

Tabel 2.13
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,177	0,204	0,129	0,129	0,129
2	Pasilambena	0,0558	0,038	0,038	0,038	0,038
3	Pasimasunggu	0,035	0,026	0,021	0,021	0,021
4	Taka Bonerate	0,021	0,019	0,021	0,021	0,021
5	Pasimasunggu Timur	0,0195	0,036	0,028	0,028	0,028

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Bontosikuyu	0,156	0,054	0,043	0,043	0,043
7	Bontoharu	0,0357	0,037	0,035	0,035	0,035
8	Benteng	0,007	0,005	0,004	0,004	0,004
9	Bontomanai	0,068	0,059	0,067	0,067	0,067
10	Bontomatene	0,04	0,033	0,029	0,029	0,029
11	Buki	0,017	0,025	0,033	0,033	0,033
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		1,472	0,038	0,360	0,376	

9. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang dan orang yang terangkut angkutan umum terjadi kenaikan jumlah dari tahun 2016 sebesar 6.235 barang dan orang terangkut hingga tahun 2019 sebesar 77.220 barang dan orang terangkut, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 40.476 barang dan orang terangkut. Pada **Tabel 2.14** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Rasio Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum.

Tabel 2.14
Rasio Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka Bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	358	7.637	8.650	8.650	8.650
7	Bontoharu	225	4.898	8.776	8.776	2.675
8	Benteng	4.125	21.652	35.128	35.148	19.330
9	Bontomanai	235	7.484	7.832	7.897	3.501
10	Bontomatene	1.081	10.321	11.094	11.094	5.378
11	Buki	211	2.386	5.635	5.655	3.112
Jumlah Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Umum		6.235	54.378	77.115	77.220	40.476

10. Jumlah Orang / Barang Melalui Dermaga / Bandara / Terminal per Tahun

Jumlah barang dan orang melalui dermaga atau bandara dan terminal terjadi kenaikan dari tahun 2016 sebesar 23.752 barang dan orang terangkut hingga tahun 2019 sebesar 64.714 barang dan orang terangkut, namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 24.761 barang dan orang terangkut. Hal ini disebabkan masa pandemi yang terjadi di tahun 2020 yang mengalami pembatasan transportasi. Jumlah barang yang terangkut melalui dermaga pelabuhan mempunyai perkembangan yang masih rendah, hal ini disebabkan pada tahun 2020 baru tersedia jasa konteiner di Pelabuhan Benteng tetapi belum tersedianya angkutan laut yang khusus untuk mengangkut barang yang melayani rute pelayaran ke wilayah kepulauan. Pada **Tabel 2.15** berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun.

Tabel 2.15

Rasio Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	125	255	515	395	173
2	Pasilambena	98	200	455	328	73
3	Pasimasunggu	428	782	1.523	1.142	451
4	Taka Bonerate	276	524	1.105	928	235
5	Pasimasunggu Timur	315	640	1.318	1.191	268
6	Bontosikuyu	1.386	2.735	5.693	5.112	1.171
7	Bontoharu	1.405	2.875	4.963	5.316	1.405
8	Benteng	13.142	18.959	31.179	28.715	15.310
9	Bontomanai	1.285	3.286	5.478	5.191	1.285
10	Bontomatene	4.225	7.428	8.945	8.670	3.423
11	Buki	1.067	3.505	7.835	7.726	967
Jumlah Orang / Barang Melalui Dermaga / Bandara / Terminal		23.752	41.189	69.009	64.714	24.761

Berdasarkan beberapa indikator kinerja diatas, terdapat 3 indikator kinerja yang memenuhi atau sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu :

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum; dan
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut antara lain :

1. Kepadatan lalu lintas masih tergolong rendah dan masih terpenuhinya kapasitas jalan.
2. Tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga angkutan umum yang dinilai lebih efisien dari segi biaya dan waktu masih menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan kegiatannya.
3. Dermaga, bandara maupun terminal sebagai simpul transportasi menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat mengingat letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan.

Sedangkan terdapat 7 indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum;
2. Rasio ijin trayek;
3. Jumlah uji KIR angkutan umum;
4. Jumlah pelabuhan laut/ferry/bandara;
5. Persentase Layanan Angkutan Darat;
6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum; dan
7. Jumlah pemasangan rambu-rambu.

Adapun faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain :

1. Terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan adanya pembatasan transportasi yang menyebabkan jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan;
2. Kurang memadainya balai uji dan alat uji kendaraan;
3. Tidak terpenuhinya anggaran dalam pembangunan dermaga; dan
4. Jumlah rambu yang terpasang belum memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan.

Adapun capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada **Tabel 2.16** berikut.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	930.690.000	1.289.697.000	1.153.700.000	1.729.777.661	1.574.842.830	882.858.220	1.254.646.748	938.113.325	1.575.341.063	1.433.581.652	0,94	0,97	0,81	0,91	0,91	38,57	42,11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	488.900.000	500.000.000	256.050.000	553.850.000	135.830.000	387.018.500	481.272.848	218.055.554	75.242.000	135.525.100	0,79	0,96	0,85	0,13	0,99	2,27	24,35
Peningkatan Disiplin Aparatur		170.000.000	40.000.000				169.999.000	39.998.250				0,99	0,99			-76,47	-76,47
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.000.000	75.000.000	30.000.000	35.000.000	9.000.000	103.621.078	68.092.821	29.825.330	34.951.200	9.000.000	0,82	0,90	0,99	0,99	1,00	-40	-34,28
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.000.000	190.000.000	40.000.000	58.000.000	112.051.000	173.875.100	189.954.441	39.725.000	56.667.600	100.901.000	0,99	0,99	0,99	0,97	0,90	12	15,51
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	9.041.854.500	1.400.000.000	3.110.000.000	2.755.776.789	2.320.803.200	8.802.104.582	199.700.000	1.814.225.298	2.189.375.131	1.295.703.204	0,97	0,14	0,58	0,79	0,55	-15,78	-40,81
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	124.000.000	170.000.000				78.999.500	167.043.300				0,63	0,98				37,09	111,44
Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.358.779.600	1.490.000.000	613.700.000	35.731.999.000	15.886.140.000	1.167.973.573	1.422.583.010	524.169.026	596.819.465	752.499.490	0,85	0,95	0,85	0,016	0,047	9,65	21,79
Pengawasan Sarana dan Prasarana Berbasis Wilayah	87.800.000					84.320.000					0,96						
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	200.000.000	270.000.000	175.450.000	80.000.000	58.000.000	184.713.500	266.270.550	155.066.521	79.133.900	57.655.000	0,92	0,98	0,88	0,98	0,99	-35,01	-41,76
Pengembangan Komunikasi dan Informasi	290.600.000					286.584.010					0,98						
Pengembangan dan Keselamatan Transportasi			499.000.000	1.202.630.000	301.425.000			462.082.250	1.104.918.101	297.366.600			0,92	0,91	0,98	141,00	139,11

Berdasarkan Tabel 2.16 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat **dikategorikan baik** pada kegiatan Pengadaan Administrasi Perkantoran yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 38,57%, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 42,11%, dan rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,99 dan pada kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 12%, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 15,51%. Hal ini disebabkan oleh kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang merupakan anggaran rutin yang secara regular dilakukan sesuai dengan operasional program kerja rutin. Sedangkan realisasi anggaran **dikategorikan buruk** pada kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 0% atau tidak tercapai. Hal ini disebabkan program tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Perhubungan pada tahun 2017 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar boleh dikatakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas di bidang perhubungan. Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang rata-rata membutuhkan serapan anggaran yang besar, seperti pembangunan pelabuhan laut, pembangunan pelabuhan penyeberangan, pengadaan angkutan laut, pengadaan angkutan penyeberangan dan lain-lain.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi

Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1. Analisis Renstra Kementerian Perhubungan

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Sementara itu, proses transformasi ekonomi harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju. Dalam arahan RPJMN 2020 – 2024 telah tercatat tantangan yang akan dihadapi meliputi : Produktivitas Tenaga Kerja Rendah, Produktivitas Kapital Rendah (ICOR tinggi 6,7), dan *Total Factor Productivity* (TFP) rendah. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi 2020 – 2024 berada pada kisaran 5,2%-5,5% (rendah) hingga kisaran 5,4% - 6,5% (tinggi) agar dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) menuju Negara Sejahtera Berpendapatan Tinggi di tahun 2036. Target pertumbuhan 5,4% - 6% memerlukan dukungan aspek transportasi baik dari sisi permintaan ataupun sisi produksi. Dari sisi permintaan (jangka pendek), investasi di kawasan industri dan KEK memerlukan konektivitas akses dari lokasi asal produksi hingga ke lokasi simpul terdekat untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang pro-investasi penyelenggaraan infrastruktur transportasi sangat diperlukan sebagai stimulus perekonomian Indonesia (*counter-cyclical policy*). Sementara itu, sejalan dengan sisi produksi (jangka menengah), maka konektivitas layanan dalam distribusi logistik akan mendorong peningkatan produktivitas (TFP, modal, tenaga kerja) melalui penciptaan lapangan kerja baru berbasis ekonomi domestik yang lebih tangguh.

2. Analisis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Tantangan dan Peluang sebagai berikut.

Tantangan :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin, pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta yang memiliki kemampuan computer diatas rata-rata.
- b. Belum adanya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi *electronic government* belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
- c. Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
- d. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
- e. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
- f. Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor.
- g. Belum optimalnya kondisi dan penataan system hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda.

Peluang :

- a. Tersedianya angkutan umum (AKAP/AKDP) yang melayani seluruh pelosok Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki peranan penting di Pulau Sulawesi.
- c. Telah tersedianya studi yang terkait dengan Pengembangan Transportasi.

- d. Beroperasinya Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Sukarno Hatta sebagai pelabuhan utama untuk Wilayah Timur.
- e. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi.

3. Analisis Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata, dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritime. Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- a. Penanganan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konversi serta mitigasi bencana;
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung;
- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional;
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional;
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokasi sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah kabupaten; dan

1. Pengembangan aspek pertanian dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.

4. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam isu prioritas pembangunan berkelanjutan dari aspek Aksesibilitas dan Infrastruktur dengan TPB terkait yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan kebijakan strategis yaitu pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah.

Dengan mengacu pada analisis Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka **Tantangan dan Peluang** Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi keterpisahan ini harus didukung dengan infrastuktur (aksesibilitas) yang memadai untuk mewujudkan transportasi yang efisien, hal ini sangat berpengaruh terhadap laju pemerataan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Kondisi alam Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan daerah kepulauan dengan gugusan pulau yang begitu banyak serta luas wilayah dimana lebih luas lautan daripada daratannya sehingga untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain tentunya sangat membutuhkan kesiapan sektor perhubungan baik sarana maupun prasarananya.
4. Sebagai salah satu daerah bahari dengan kekayaan hasil laut yang sangat melimpah tentunya sangat membutuhkan peran sektor perhubungan melalui ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk dapat menggali, mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam laut tersebut sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.

5. Sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata kreatif tentu membutuhkan dukungan dari berbagai sektor untuk dapat menggali, mengembangkan dan mempromosikan kekayaan wisata tersebut, yang tentunya sektor perhubungan tidak lepas akan peran dan partisipasinya yang sangat besar dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang mampu mendorong berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata terutama dalam upaya pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau ke setiap kawasan wisata.
6. Keterbatasan kewenangan kabupaten. Dinas Perhubungan dengan Berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tanggal 17 November 2020, Nomor: AJ.502/33/DRJD/2020, Perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang mengatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat di operasionalkan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penertiban Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji, dan Bagi daerah yang masih memiliki Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji Tanda Uji (plat/peneng) dan Tanda Sampung agar segera dimusnahkan atau tidak dipergunakan kembali dengan pengawasan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kemudian dilaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat (BPTD) wilayah setempat. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan untuk pengadaan balai uji dan alat uji dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan atau Kementerian Perhubungan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
7. Belum adanya dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Kepulauan Selayar yang tentunya tidak terlepas dari Tatranas (Tatanan Transportasi Nasional) dan Tatralok Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi acuan utama dalam menyusun, merancang dan menata sistem jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai akibat dari tingkat keterhubungan antarwilayah baik itu

antardesa, antarkecamatan maupun antarpulau dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar atau bahkan antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten lainnya sehingga terwujud pemerataan aksesibilitas dan mobilitas bagi segenap kepentingan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

8. Terbatasnya kemampuan APBD pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk fokus membiayai pembangunan di sektor perhubungan sehingga dibutuhkan bantuan berupa dana maupun sarana baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak swasta yang mau berinvestasi di sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Di samping tantangan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas terdapat pula peluang yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah tepatnya pada bidang perhubungan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat, antara lain:

1. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki posisi strategis yang secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat – timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI I dan II. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Hal ini tentunya mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat peralihan transportasi baik dari wilayah timur maupun dari wilayah barat Indonesia atau dengan kata lain Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi daerah transit bagi kapal-kapal laut yang berlayar dari Timur Indonesia menuju Indonesia bagian Barat atau sebaliknya, selain itu dapat pula menjadi daerah transit bagi pesawat udara yang hendak terbang melintasi dua wilayah Indonesia tersebut. Hal ini harus didukung dengan sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung dalam mewujudkan pengembangan kawasan pusat distribusi Kawasan Timur Indonesia.

2. Beroperasi dan berkembangnya Bandara H. Aroeppala Selayar, Pelabuhan Penyeberangan Pamatata, Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang dan Pelabuhan Laut Rauf Rahman Benteng yang menjadi pintu gerbang utama Kabupaten Kepulauan Selayar dari jalur transportasi udara, transportasi darat dan transportasi laut.
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih dapat dimplementasikan dalam pembangunan sektor perhubungan sehingga dapat membantu dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta dapat mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan dan transportasi.
4. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar yang sangat melimpah terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan baik dari sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate maupun dari sektor lainnya yang tentunya membutuhkan peran penting sektor perhubungan untuk dapat mengeksplor dan mendistribusikan semua potensi tersebut sehingga memiliki nilai guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tantangan dan peluang seperti yang disebutkan diatas maka diuraikan terkait besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan RTRW dan telaahan KLHS sebagaimana pada **Table 2.17 – Tabel 2.20** berikut.

Tabel 2.17
**Kebutuhan Pelayanan dan Arahannya Lokasi Pengembangan
berdasarkan telaahan Kementerian Perhubungan**

No.	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan	Kebutuhan Pelayanan	Arahannya Lokasi Pengembangan Pelayanan
1.	Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, Pelabuhan, dan Terminal;	Peningkatan Fasilitas Pokok dan Penunjang di Pelabuhan dan Terminal	Pelabuhan Pamatata dan Terminal Benteng
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kecamatan Kepulauan
3.	Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan;	Pengadaan LPJU, Rambu-Rambu Jalan dan Perlengkapan Jalan (Guadrail)	Kabupaten Kepulauan Selayar (Kecamatan Daratan dan Kecamatan Kepulauan)
4.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.	Pembangunan Dermaga	Kabupaten Kepulauan Selayar (Kecamatan Kepulauan)

Tabel 2.18
**Kebutuhan Pelayanan dan Arahkan Lokasi Pengembangan
berdasarkan telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Selatan**

No.	Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Kebutuhan Pelayanan	Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan
1.	Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, Pelabuhan, dan Terminal;	Peningkatan Fasilitas Pokok dan Penunjang di Pelabuhan dan Terminal	Pelabuhan Pamatata dan Terminal Benteng
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kecamatan Kepulauan
3.	Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan;	Pengadaan LPJU, Rambu-Rambu Jalan dan Perlengkapan Jalan (Guadrail)	Kabupaten Kepulauan Selayar (Kecamatan Daratan dan Kecamatan Kepulauan)
4.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.	Pembangunan Dermaga	Kabupaten Kepulauan Selayar (Kecamatan Kepulauan)

Tabel 2.19
**Kebutuhan Pelayanan dan Arahannya Lokasi Pengembangan
berdasarkan telaahan RTRW**

No.	Telaahan RTRW	Kebutuhan Pelayanan	Arahannya Lokasi Pengembangan Pelayanan
1.	Penanganan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;	Membangun kemitraan pengelolaan / pengadaan Angdes melalui BUM Desa	Program Gerbang Sari
2.	Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan.	Pembangunan Tambatan Perahu dan Dermaga di wilayah Kepulauan	Kecamatan Kepulauan

Tabel 2.20
**Kebutuhan Pelayanan dan Arahannya Lokasi Pengembangan
berdasarkan telaahan KLHS**

No.	Telaahan KLHS	Kebutuhan Pelayanan	Arahannya Lokasi Pengembangan Pelayanan
1.	Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Aksesibilitas antar Wilayah	Pembangunan dermaga dan tambatan perahu	Kecamatan Kepulauan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan baik pelabuhan laut, udara termasuk terminal bus, secara keseluruhan telah terlaksana. Hanya saja, masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan perhubungan, terutama di sektor pelayanan transportasi, serta mengupayakan pemerataan infrastruktur dengan pola keterpaduan moda transportasi wilayah antara darat, laut dan udara.

Dari data yang diperoleh, masih ada beberapa aspek yang menjadi masalah selama ini antara lain; Jumlah arus penumpang angkutan umum yang meningkat. Sementara itu, masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum. Sementara pada sisi lain, keadaan sarana pendukung fasilitas pelabuhan laut/ferry/udara/ terminal bus belum lengkap. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya peningkatan dan penambahan fasilitas pendukung pelabuhan laut, ferry, udara, dan terminal bus termasuk perbaikan jalan sebagai satu kesatuan moda transportasi yang tidak terpisahkan.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tata kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal	Rendahnya mobilitas dan aksesibilitas angkutan umum	Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi
2	Pelayanan satu pintu penertiban izin perhubungan belum berjalan maksimal	Banyaknya kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan penertiban izin	Kurang memadainya alat uji kendaraan yang merupakan salah satu syarat perizinan trayek
3	Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya	Belum tersedianya alat uji kendaraan yang memadai	Kurangnya anggaran yang tersedia
4	Belum adanya studi beberapa pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun	Belum terselesaikannya proses studi beberapa pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun	Kurangnya anggaran yang tersedia
5	Masih minimnya keberadaan tanda-tanda perlengkapan jalan	Banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan yang tidak dapat dipenuhi	Kurangnya anggaran yang tersedia
6	Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor	Penganggaran Daerah yang terbatas	Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas antara stake holder

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, visi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah :

“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

Bandar Maritim : Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

Kawasan Timur : Menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021-2026, yaitu :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan menuju dimensi peningkatan status desa, dan dimensi peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan, meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang

dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

3.2.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah sesuai yang telah ditentukan dan diarahkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih terdiri dari dua program besar yakni Program Strategis dan Program Prioritas. Program Prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu:

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL)

Program Strategis Pembangunan Distribusi Logistik (PDL) akan berpusat di Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene dan sekitarnya. Kawasan PDL di Pamatata dan sekitarnya tersebut terdiri dari 3 (tiga) zona pengembangan, masing-masing zona distribusi, zona pelabuhan/petikemas, dan zona industri. Sementara itu tahapan pengembangan dibagi juga kedalam 3 (tiga) tahapan besar, masing-masing tahapan pembentukan, tahapan pembangunan, dan tahapan pengelolaan.

Secara kewilayahan, Kawasan Pusat Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub Kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
- b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Program Strategis Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata akan dipusatkan di Pulau Pasi Gusung dan Matalalang dengan luasan 7.1600.000 m². Lokasi ini merupakan lokasi yang telah diusulkan ke Dewan KEK Nasional, yang berarti pembangunan dalam lokasi KEK akan dilakukan oleh konsorsium pengusul dan pembangunan di luar KEK akan dilakukan melalui pendanaan pemerintah dengan dukungan APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Program Strategis Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) akan berpusat di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan

Bontosikuyu. Kawasan KIPT terdiri dari 5 (lima) zona pengembangan, masing-masing zona pemberdayaan, zona industri ikan hidup, zona distribusi ikan beku, zona industri produk akhir, dan zona industri berbahan baku ikan.

Secara kewilayahan, Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
- b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea.
- d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dalam hal ini nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dipilih masing-masing 5 (lima) desa sasaran untuk pembangunan desa wisata, desa nelayan, desa tani, dan desa koperasi, usaha kecil menengah, melalui parameter sesuai latar belakang potensi wilayah yang dimiliki masing-masing desa termasuk kesiapan sumberdaya masyarakatnya. Adapun desa-desa yang tercakup dan terpilih sebagai desa pengembangan antara lain:

- a. Desa Wisata : Desa Menara Indah, Bontomarannu, Bahuluang, Patilereng, Polassi.
- b. Desa Koperasi dan UMKM : Desa Bahuluang, Bontosunggu, Bungaiya, Bontomarannu, Appatanah.
- c. Desa Nelayan : Bontosunggu, Bonea, Mekar Indah, Appatanah, Ujung.

d. Desa Tani : Pengembangan Kampong Munte, Desa Maharayya, Onto, Kohala, Lantibongan, Tamalanrea, Bontotangga, Kaburu, Bontolembangan, Batangmata Sapo, Laiyolo Baru. Pengembangan Padi, Desa Ujung, Kembangragi, Bontobulaeng, Bontosaille, Bontomalling, Labuang Pamajang, Lembang Baji, Ma'minasa, Bontobaru, Teluk Kampe. Pengembangan Palawija, Desa Kayuadi, Bonerate, Kalaotoa, Bonea Timur, Lowa. Pengembangan Peternakan, Desa Bungaiya, Binanga Sombaiyya, Nyiur Indah, Tanamalala, Bonerate.

5. Program RPJMD

Adapun program pembangunan daerah pada sektor Perhubungan, adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 3) Program Pengelolaan Pelayaran; dan
- 4) Program Pengelolaan Penerbangan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus

diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Adapun Sasaran Strategis berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum;
5. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten;
6. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan;
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian;
8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik.

Selanjutnya hal - hal yang perlu dilakukan adalah sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah berupa dukungan pendanaan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut terutama di wilayah kepulauan guna mendorong pengembangan konektivitas antarpulau, antarkecamatan dan antardesa guna untuk mendukung terwujudnya kawasan pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia, pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan kawasan ekonomi khusus (KEK);

2. Pengadaan sarana transportasi seperti angkutan penyeberangan dalam rangka memberikan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas yang merata terhadap masyarakat, angkutan umum untuk menjangkau wilayah-wilayah pedesaan, serta angkutan khusus untuk kawasan pariwisata guna mendukung peningkatan pembangunan sektor pariwisata; dan
3. Pembangunan dan pengelolaan, sarana, prasarana, dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, Pelabuhan, dan Terminal;
2. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
3. Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi-Selatan adalah:

1. Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Transportasi;
2. Meningkatnya layanan Angkutan Penumpang dan Barang;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi sesuai Aturan Perundangan;
4. Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 2009 Km.

PROGRAM PRIORITAS PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUL-SEL adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha;
2. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Angkutan PELRA;

3. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bira;
4. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar;
5. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar;
6. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bone;
7. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur;
8. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bira;
9. Penyusunan Perencanaan Teknis Pelabuhan dan Dermaga Wisata;
10. Pembangunan Dermaga Wisata;
11. Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan;
12. Operasional Kapal Pelra;
13. Kampanye Keselamatan Pelayaran.

PROGRAM PRIORITAS PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Koordinasi Pelaksanaan RAD-GRK;
5. Pemeliharaan Halte dan Peminahannya;
6. Review Desain Rute BRT;
7. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK);
8. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Transportasi Mamminasata;
9. Diklat Teknis Non Struktural Bidang Lalu Lintas;
10. Penanganan Kemacetan Lalu Lintas;
11. Kampanye Keselamatan Pelayaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 yang disahkan pada PERDA Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 Tahun 2009, Rencana

Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi, Pada Pasal 26 menyebutkan bahwa Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan Provinsi mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar Kabupaten dalam provinsi yang menghubungkan Bira – Pamatata. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032, maka rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut.

1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konversi serta mitigasi bencana;
4. Pemanfaatan fungsi kawasan lindung;
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata;
9. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional;
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional;
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokasi sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah kabupaten; dan
12. Pengembangan aspek pertanian dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.

Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan terdiri atas :

1. Mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
2. Mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
3. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi public menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana **Tabel 3.2** berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan	Masih adanya kawasan yang belum terlayani trayek angkutan desa	Keterbatasan Pengusaha Angkutan Desa	Sinergitas antar stakeholder terkait pelayanan angkutan terjalin dengan baik
		Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Keterbatasan Anggaran Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi
2.	Pengembangan Aksesibilitas Jaringan Transportasi Kepulauan	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Transportasi Kepulauan	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi Kepulauan	Kebutuhan Aksesibilitas Jaringan Transportasi Kepulauan sangat besar
			Keterbatasan Anggaran Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Propinsi
			Keterbatasan Kewenangan Pengadaan / Pengembangan Sarana dan Prasarana	Koordinasi antar Perangkat Daerah terjalin dengan baik

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

Tabel 3.3
Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

No.	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1	Resiko Bencana	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim
2	Kemiskinan	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
3	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air
4	Pekerjaan Layak	Menjamin Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak
5	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta perikanan
6	Aksesibilitas dan Infrastruktur	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah
7	Tata Kelola Pemerintahan	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Aksesibilitas antar Wilayah	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Transportasi	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Kebutuhan Infrastruktur dan Aksesibilitas antar wilayah yang sangat besar
			Keterbatasan anggaran Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Propinsi
			Keterbatasan Kewenangan Pengadaan / pengembangan Sarana dan Prasarana	Koordinasi antar Perangkat Daerah terjalin dengan baik

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan,

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS diketahui permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

- a. Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal.
- b. Pelayanan satu pintu penertiban Izin perhubungan belum berjalan maksimal.
- c. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya.
- d. Belum adanya studi beberapa Pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun.
- e. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu perlengkapan jalan.
- f. Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor.

Sedangkan Faktor Penghambat yaitu :

- a. Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD;
- b. Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- c. Belum optimalnya pengelolaan data bidang perhubungan;
- d. Masih belum tercapainya pelayanan sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Masih kurangnya pelayanan manajemen angkutan umum.

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran;
- c. Pengadaan sarana Alat Uji Kendaraan;
- d. Peningkatan pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi;
- e. Peningkatan pergerakan penumpang dan barang dari daratan ke kepulauan dan sebaliknya;
- f. Peremajaan angkutan desa;
- g. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan / balai uji.
- h. Pengadaan sistem informasi transportasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”***. Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.**
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
- 4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.**
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026, yaitu :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan ke-1** : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan **sasaran ke-1**, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-4, terkait dengan **tujuan ke-4** : mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-4) dengan **sasaran ke-7**, yaitu meningkatnya usaha pariwisata (S-7), dan **sasaran ke-8**, yaitu meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan (S-8).

Dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026 yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Perhubungan seperti yang dikemukakan di atas maka dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD	57,00 (CC)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (B)	75,00 (BB)
		Meningkatnya Nilai SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Pencapaian Kinerja	18,72 14,95 10,80 4,26 8,27	18,95 16,47 11,00 4,88 8,70	19,95 17,47 12,00 5,88 9,70	20,95 18,47 13,00 6,88 10,70	21,95 19,47 14,00 7,88 11,70
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	60%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisataaan	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,76%	5,59%	6,41%	7,24%	8,07
3.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Transportasi	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	13,50%	14,00%	15,00%	15,50%	16,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Lima tahun kedepan.

Pembangunan sektor transportasi memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam menegembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor perhubungan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Faktor Internal (IFAS) :

a. Kekuatan (*Strength*), antara lain terdiri dari :

1. Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian
2. Adanya dukungan regulasi yang berlaku
3. Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai
4. Terpenuhinya kuantitas SDM Penarik Retribusi Terminal dan Parkir

b. Kelemahan (*Weakness*), antara lain terdiri dari :

1. Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi
2. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah
3. Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat
4. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap

5. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi
6. Belum memadainya alat uji kendaraan syarat akreditasi

Faktor Eksternal

- a. Peluang (Opportunity), terdiri dari :
 1. Posisi geografis Selayar yang terpisah dengan lautan sangat membutuhkan sarana transportasi untuk menopang kebutuhan masyarakat
 2. Banyaknya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
 3. Banyaknya kebutuhan LPJU pada ruas jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
 4. Terdapat retribusi pelabuhan dan retribusi parkir yang menunjang PAD
- b. Ancaman (Treath), terdiri dari :
 1. Kurangnya armada transportasi laut menuju pulau-pulau
 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi
 3. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada
 4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya
 5. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi seperti motor.

Tabel 5.1

Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisa SWOT Pengembangan Sektor Perhubungan di Kabupaten Kepulauan Selayar		
INTERNAL	Strenght (S) (Kekuatan)	Weakness (W) (Kelemahan)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian 2. Adanya dukungan regulasi yang berlaku 3. Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai 4. Terpenuhinya kuantitas SDM Penarik Retribusi Terminal dan Parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi 2. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah 3. Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat 4. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap 5. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi 6. Belum memadainya alat uji kendaraan syarat akreditasi
Opportunity (O) (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Selayar yang terpisah dengan lautan sangat membutuhkan sarana transportasi untuk menopang kebutuhan masyarakat 2. Banyaknya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten 3. Banyaknya kebutuhan LPJU pada ruas jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten 4. Terdapat retribusi pelabuhan dan retribusi parkir yang menunjang PAD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi sarana dan prasarana di bidang perhubungan. 2. Membuat perencanaan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan darat dan laut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapabilitas SDM di bidang perhubungan. 2. Pengembangan system informasi. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dalam rangka peningkatan PAD di sector perhubungan.
TREATHS (T) (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya armada transportasi laut menuju pulau-pulau 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi 3. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya 5. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi seperti motor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. 2. Meningkatkan kapasitas balai uji dan alat uji kendaraan. 3. Sinergitas dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pelayanan uji kendaraan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi I	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi Informasi yang Baik	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	

Misi III	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Terpadu	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Transportasi	Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder

Misi IV	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antar Wilayah	Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Pelabuhan, Jangkauan Hub-hub melalui Kerjasama Antar Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Perhubungan dan Transportasi
			Peningkatan Infrastruktur Kepelabuhanan
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder
			Pembangunan Simpul-simpul Transportasi

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Pendukung yaitu :

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan pada Tabel 5.1 diatas, peran Dinas Perhubungan dalam mendukung Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan dari segi transportasi menjadi sangat penting antara lain :

1. Dalam mendukung pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pemindahan barang dari pemasok ke konsumen juga dilakukan dengan cepat oleh transportasi, proses pendistribusian barang dari pemasok ke konsumen tersebar luas secara lintas ruang dan waktu. Aliran barang dari distributor ke konsumen sangat mempengaruhi besarnya biaya logistik. Dinas Perhubungan memiliki peranan dalam aktivitas transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, seperti pembukaan rute/trayek angkutan darat menuju kawasan PDL, pembangunan shuttle halte dalam kawasan PDL dan pengadaan lampu jalan dalam kawasan PDL yang dimasukkan dalam Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan mendukung dan memaksimalkan perannya terhadap pengembangan aksesibilitas transportasi pada spot-spot destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah konektivitas daerah satu dengan lainnya terutama pulau-pulau yang memiliki obyek wisata unggulan. Program Dinas Perhubungan dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata antara lain pembangunan tambatan perahu, penerangan LPJU dalam kawasan wisata, dan mendukung untuk memfasilitasi penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter guna

menunjang investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar yang cukup besar.

3. Dari segi dukungan terhadap Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT), Dinas Perhubungan memiliki peran dalam pendukung sub-sub sentra KIPT dengan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (LPJU).
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari) adalah program unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerbangsari adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan. Dinas Perhubungan dalam mendukung program Gerbangsari mempunyai peran dalam pembangunan tambatan perahu dan pengadaan LPJU di desa-desa guna mendukung perekonomian perdesaan.

Skenario Pengembangan Bidang Perhubungan Untuk Mendukung Program 3 Pembangunan Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan Gerbang Sari.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan “kepulauan” yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah tersebut serta menjamin pemerataan maupun perpindahan barang maupun penduduk, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mendukung PDL, KEK, KIPT, dan Gerbang Sari Dinas Perhubungan berperan dalam membangun dan meningkatkan akses ke kawasan tersebut. Pengembangan

bidang perhubungan dengan adanya perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya wilayah kepulauan serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah perjalanan masyarakat termasuk perjalanan wisata, meningkatkan moda transportasi umum dan arus logistik barang, peningkatan PAD dan menjaga kestabilan harga barang dan disparitas harga. Adapun rencana pengembangan antara lain :

- a. Revitalisasi, rehabilitasi dan penambahan panjang tambatan perahu yang diprioritaskan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa untuk mendukung program Gerbang Sari;
- b. Pembangunan dermaga penyeberangan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana jalan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa wisata.

Normalisasi Tambatan Perahu di Daerah Pesisir

Melihat sarana dan prasarana untuk tambat labuh yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat kurang. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan, selain itu dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil menjadikan transportasi menjadi sangat penting. Dalam kondisi eksisting tambat labuh masih kurang efisien untuk berlabuhnya perahu nelayan di dermaga dan juga lalu lalang nelayan saat bongkar muat. Dengan adanya normalisasi tambatan perahu di daerah pesisir akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Dinas Perhubungan dalam hal normalisasi tambatan perahu difokuskan ke desa-desa wisata demi mendukung KEK Pariwisata, sub-sub sentra KIPT dan desa-desa untuk mendukung gerakan Gerbang Sari.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat							Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100	100	7.329.994.863	100	7.430.342.493	100	7.616.323.965	100	7.799.039.577	100	7.985.124.662	100	7.985.124.662	SEKRETARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
	Meningkatnya Tertib Administrasi							Persentase Kelancaran Administrasi,	100	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						Keuangan dan Operasional Perkantoran																
		X	XX	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	36.000.000	3	36.000.000	3	41.000.000	3	51.000.000	3	111.000.000	3	111.000.000	SEKRETARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	SEKRETARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							(Dokumen)																
		X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang tersusun (Dokumen)	1	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	1	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok (Dokumen)	1	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	1	4.875.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan (Dokumen)	1	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	1	4.375.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan (Dokumen)	N/A	-	-	-	-	1	5.000.000	1	15.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	35,10	90	5.078.324.142	95	5.078.324.142	97	5.080.824.142	98	5.080.824.142	100	5.080.824.142	100	5.080.824.142	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	61	61	5.054.474.142	61	5.054.474.142	61	5.054.474.142	61	5.054.474.142	61	5.054.474.142	61	5.054.474.142	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi	Tersusunnya RFK (Laporan)	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Anggaran																
		X	XX	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas SDM ASN	7	23	50.000.000	32	50.000.000	48	100.000.000	81	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	SEKREARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	61	5	50.000.000	5	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SEKREARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasikan (Buah)	1	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKREARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		X	XX	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	100	440.778.321	100	541.125.951	100	665.607.423	100	740.323.035	100	747.408.120	100	747.408.120	SEKRETARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar		
		X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Unit)	103	103	36.218.321	103	36.565.951	103	36.167.423	103	35.883.035	1033	36.818.120	1033	36.818.120	SEKRETARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar		
		X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Spanduk yang dicetak (Lembar)	8	8		8		8		8		8		8		8		8	
								Jumlah Foto Copy (Lembar)	23.050	23.050	11.540.000	23.050	11.540.000	23.050	11.540.000	23.050	11.540.000	23.050	11.540.000	23.050	11.540.000	23.050	11.540.000	SEKRETARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
								Jumlah Jilid Dokumen																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							(Eksamplar)	136	136		136		136		136		136		136				
		X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang disediakan (Unit)	50	51	3.000.000	50	3.000.000	55	3.850.000	55	3.850.000	65	5.000.000	65	5.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran/Majalah (Buah)	365	365	30.000.000	365	30.000.000	365	30.000.000	365	30.000.000	365	30.000.000	365	30.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Iklan Media Cetak dan Elektronik (Kali)	9	9		9		9		9		12		12		SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu (Dos)	700	700	25.020.000	700	25.020.000	700	29.020.000	700	29.020.000	700	29.020.000	700	29.020.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah (orang)	202	210		250		300		350		350		350			Kabupaten Kepulauan Selayar
							Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi (orang)	66	76	250.000.000	96	350.000.000	116	470.000.000	125	550.000.000	125	550.000.000	125	550.000.000	SEKRETA RIAT	Provinsi Sulawesi Selatan	
							Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi (Orang)	20	25		30		40		50		50		50			Luar Provinsi Sulawesi Selatan	
		X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	3	4	85.000.000	6	35.000.000	8	75.000.000	10	70.000.000	16	85.000.000	16	85.000.000	SEKRETA	Kabupaten Kepulauan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
							Kantor																RIAT	Selayar	
		X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Unit)	N/A	-	-	1	50.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	50	-	-	-	-	-	-	55	50.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	41	-	-	-	-	-	2	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar	
		X	XX	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	100	1.368.220.400	100	1.368.220.400	100	1.368.220.400	100	1.368.220.400	100	1.374.220.400	100	1.374.220.400	SEKRETARIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100	100	132.950.000	100	132.950.000	100	132.950.000	100	132.950.000	100	132.950.000	100	132.950.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		X	XX	01	2.07	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan (orang/bulan)	72	72		72		72		72		72		72		72			
								Tersedianya Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Orang/Bulan)	204	211		211		211		211		221		221		221		SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang	40	60	356.672.000	70	356.672.000	80	360.672.000	90	358.672.000	100	421.672.000	100	421.672.000	100	421.672.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Dipelihara																
		X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara (m2)	462	100		100		100		100		462		462			
							Panjang Pagar Kantor yang dipelihara (m)	48	35	50.000.000		35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
							Luas Halaman Kantor yang dipelihara (m2)	15										15		15			
		X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	41	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	258.000.000	11	258.000.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara (unit)																
		X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Peningkatan Usia Pakai Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II (%)	100	100	38.630.000	100	38.630.000	100	38.630.000	100	38.630.000	100	38.630.000	100	38.630.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar
		X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Unit)	123	25	18.042.000	21	18.042.000	28	22.042.000	28	20.042.000	28	25.042.000	28	25.042.000	SEKRETA RIAT	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Transportasi	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	2	15				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN																				
		2	15	02			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,54	30,69		30,77		30,85		30,92		31,00		31,00		1.680.000.000	1.697.999.200	1.740.500.120	1.782.254.718	1.824.779.315	1.824.779.315	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
		2	15	02	2.01		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	N/A	52	50.000.000	52	50.000.000	52	50.000.000	52	55.000.000	52	60.000.000	52	60.000.000	60.000.000	52	60.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar	
		2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk																			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)																
		2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya SK Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ (Dokumen)															
		2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan, Kepadatan Lalu Lintas dan Moda Transportasi (Laporan)	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	02	2.02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	N/A	52	650.000.000	52	650.000.000	52	670.000.000	52	932.000.000	52	940.000.000	52	940.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pasarana Jalan yang terbangun (Halte) (Unit)															
		2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota (LPJU) (Unit)	N/A	90	275.000.000	90	275.000.000	90	295.000.000	150	432.000.000	150	440.000.000	150	440.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pasarana Jalan yang direhabilitasi dan															

*

*/**/**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							dipelihara (Unit)																	
		2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang terpelihara (LPJU) (Unit)	188	188	375.000.000	188	375.000.000	188	375.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar	*/**/****
		2	15	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	96,4	89	70.000.000	89	70.000.000	89	90.000.000	89	130.000.000	89	132.000.000	89	132.000.000	UPTD TERMINAL DAN PERPARIRAN	Kabupaten Kepulauan Selayar	
		2	15	02	2.03	01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							(Dokumen)																
		2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal (Unit)															
		2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal (Unit)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	130.000.000	1	132.000.000	1	132.000.000	UPTD TERMINAL DAN PERPARIRAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan terpelihara (Unit)															
		2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang mengikuti															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Tipe C	Diklat / Pelatihan / Bimtek (Orang)															
		2	15	02	2.04		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tingkat Keterpenuhan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir															
		2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
		2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten (Kali)															
		2	15	02	2.05		Kegiatan Pengujian	Persentase Tingkat	88,28	52	535.000.00	52	535.000.0	52	535.000.0	52	65.000.00	52	65.000.00	52	65.000.00	UPTD PENGUJ	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Berkala Kendaraan Bermotor	Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			0		00		00		0		0		0	IAN KENDARAAN BERMOTOR	Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan (Unit)	1	1	535.000.000	1	535.000.000	1	535.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan / Bimtek Pengujian Kendaraan Bermotor (Orang)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							Bermotor																	
		2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terregistrasi (Unit)																
		2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Smart Card (Bukti Lulus Uji) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia (Buah)																
		2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Berkala Kendaraan Bermotor	Bermotor yang disosialisasikan (Dokumen)																
		2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)															
		2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara (Unit)															
		2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Berkala Kendaraan Bermotor																
		2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Peraturan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)															
		2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	02	2.06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	N/A	52	375.000.000	52	375.000.000	52	375.000.000	52	575.000.000	52	600.000.000	52	600.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersusunnya SK Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten (Dokumen)															
		2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	Tersedianya Fasilitas Jalan dalam rangka	N/A	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	BIDANG LALU LINTAS	Kabupaten Kepulauan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Rambu-Rambu Lalu Lintas/Guadrail) (Unit)														DAN ANGKUTAN	Selayar
		2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksannya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)															
		2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																
		2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Penertiban Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru Perayaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan dan Event Daerah (Kegiatan)	12	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.07		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/	Persentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	N/A	-	-	52	17.999.200	52	20.500.120	52	25.254.718	52	27.779.315	52	27.779.315	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Kota	untuk Jalan Kabupaten															
		2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terciptanya Kebijakan Tata Kelola Andalalin Secara Lengkap dan Memenuhi Syarat (Dokumen)															
		2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Tersedianya Penilai Andalalin yang Profesional (Orang)															
		2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Kali)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin untuk Kelancaran Lalu Lintas (Laporan)	N/A	-	-	1	17.999.200	1	20.500.120	1	25.254.718	1	27.779.315	1	27.779.315	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	02	2.08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Tingkat Keterpenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang mengikuti Pelatihan / Diklat (Orang)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)															
		2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)															
		2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																	
		2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	02	2.09		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten yang															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
		2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	tersedia (Unit)															
		2	15	02	2.10		Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk	Persentase Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan															
		2	15	02	2.10	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Angkutan Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sib Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Daerah Kabupaten/Kota	tersedia (Unit)															
		2	15	02	2.10	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten (Laporan)															
		2	15	02	2.11		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu)	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten yang ditetapkan															
		2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencanan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (Buah)															
		2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu)	Jumlah Trayek yang tersedia (Buah)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Daerah Kabupaten/Kota																
		2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (Laporan)															
		2	15	02	2.12		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						ota	ditetapkan																
		2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan (Dokumen)															
		2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan (Laporan)															

*

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	02	2.13		Kegiatan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	15	02	2.13	01	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Penetapan															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Dengan Menggunakan Taksidalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (Dokumen)															
		2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Kabupaten/Kota	(Laporan)																
		2	15	02	2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik yang terfasilitasi (Laporan)																
		2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Telaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten (Kali)															
		2	15	02	2.15		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	02	2.15	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)															
		2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten (Kali)																	
		2	15	02	2.16	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Angkutan Trayek serta Angkutan Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Angkutan Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Kabupaten/ Kota	ditetapkan															
		2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (Dokumen)															
		2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																
		2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Transportasi	Meningkatnya Fasilitas Transportasi Antar Wilayah	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	N/A	55,73 %	1.490.000.000	60,66 %	1.510.398.100	63,94%	1.548.203.364	70,50%	1.585.344.763	73,78 %	1.623.171.089	73,78 %	1.623.171.089	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN & BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	03	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili	Persentase Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Dalam Daerah Kabupaten / Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten / Kota yang diterbitkan															
		2	15	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Izin Penyelenggaraan Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						secara Elektronik																	
		2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten (Kali)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.02		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.15	03	2.02	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten (Dokumen)																	
		2.15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten (Kali)																
		2.15	03	2.05		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	03	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin Usaha Angkutan Penyeberangan yang Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten (Kali)																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.06		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten / Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota		N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten (Dokumen)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten (Laporan)															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.07		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten yang ditetapkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten (Dokumen)																	
		2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten (Laporan)																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	03	2.08		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Elektronik	(Laporan)																
		2.15	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Kali)																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.09		Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten yang ditetapkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.15	03	2.09	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)																	
		2.15	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta	Tersedianya Dokumen Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten (Dokumen)																
		2	15	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.10		Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)																
		2.15	03	2.10			Tersedianya Dokumen DED Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)																
		2.15	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal																
		2.15	03	2.12		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	52	1.490.000.000	52	1.510.398.100	52	1.548.203.364	52	1.585.344.763	52	1.623.171.089	52	1.623.171.089	BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	Kabupaten Kepulauan Selayar	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)																
		2.15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan / Revitalisasi / Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu (Unit)	N/A	6	1.200.000.000	6	1.215.000.000	6	1.250.000.000	6	1.285.000.000	7	1.322.000.000	7	1.322.000.000	BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	Kabupaten Kepulauan Selayar	**/**
		2.15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Persentase Keterpenuhan Operasioanl UPTD	94,56	94,56	290.000.000	94,56	295.398.100	94,56	298.203.364	94,56	300.344.763	94,56	301.171.089	94,56	301.171.089	BIDANG PRASARANA DAN	Kabupaten Kepulauan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pamatata, UPTD Pelabuhan Laut Lokal (%)															KESELAMATAN	Selayar
		2.15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pengawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Jumlah Rambu Suar yang terpelihara) (Unit)																
		2.15	03	2.14		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.15	03	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Elektronik (Dokumen)																	
		2.15	03	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal (Kali)																	
		2.15	03	2.15		Kegiatan Penerbitan Izin Pengembangan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengembangan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.15	03	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)																	
		2.15	03	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (Kali)																
		2.15	03	2.16		Kegiatan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)																
		2.15	03	2.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (Kali)																	
		2.15	03	2.17		Kegiatan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.17	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)																
		2.15	03	2.17	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelak																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Pekerjaan Pengerukan diWilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	sanaan Izin Pekerjaan Pengerukan diWilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Kali)																
		2.15	03	2.18		Kegiatan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.18	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Perizinan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Perizinan Pelayanan Berusaha Secara Terintegrasi (Elektronik (Dokumen))																
		2.15	03	2.18	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Kali)																
		2.15	03	2.19		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.15	03	2.19	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	15	03	2.19	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal (Kali)															
Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang	N/A	-	-	100	5.000.000	100	5.125.150	100	5.248.102	100	5.373.322	100	5.373.322	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							diterbitkan																
		2	15	04	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Dokumen)	N/A	-	-	1	5.000.000	1	5.125.150	1	5.248.102	1	5.373.322	1	5.373.322	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar
		2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Tersedianya Fasilitasi Penertiban Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter (Dokumen)	N/A	-	-	1	5.000.000	1	5.125.150	1	5.248.102	1	5.373.322	1	5.373.322	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Kabupaten Kepulauan Selayar

**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sib Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
TOTAL																								
										10.499.994.863		10.643.739.793		10.910.152.599		11.171.887.160		11.438.448.388		11.433.075.066				

Keterangan : * : Kegiatan pendukung PDL, ** : Kegiatan Pendukung KEK, * : Kegiatan Pendukung KIPT**

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	Pengadaan Alat Uji Kendaraan							Benteng	2.500.000.000	APBN / APBD I	
2	Penyusunan Dokumen DED Dermaga Plengsengan							Kecamatan Kepulauan	2.400.000.000	APBN / APBD I	Proses Penyusunan Dokumen FS dan Dokumen UKL-UPL
3	Pembangunan Dermaga Plengsengan							Kecamatan Kepulauan		APBN	Proses Penyusunan Dokumen FS dan Dokumen UKL-UPL
4	Pembangunan Tambatan Perahu Labuang Nipayya	100 m						Menara Indah	1.300.000.000	DAK/APBD I	
5	Pembangunan Tambatan Perahu Turungan	50 m						Bahuluang	675.000.000	DAK/APBD I	
6	Revitalisasi Tambatan Perahu Bahuluang	17 m						Bahuluang	200.000.000	DAK/APBD I	
7	Revitalisasi Tambatan Perahu Padang	100 m						Liang Kareta	1.250.000.000	DAK/APBD I	
8	Revitalisasi Tambatan Perahu Manarai	50 m						Liang Kareta	750.000.000	DAK/APBD I	
9	Revitalisasi Tambatan Perahu Appatanah	300 m						Bahuluang	3.750.000.000	DAK/APBD I	

No.	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
10	Revitalisasi Tambatan Perahu Menara Indah	77 m						Menara Indah	900.000.000	DAK/APBD I	
11	Perbaikan / Penambahan Panjang Tambatan Perahu Kayuadi							Kayuadi	250.000.000	DAK/APBD I	
12	Perbaikan / Penambahan Panjang Tambatan Perahu Bonerate							Desa Bonea, Bonerate	250.000.000	DAK/APBD I	
13	Perbaikan / Penambahan Panjang Tambatan Perahu Kalaotoa							Kalaotoa	250.000.000	DAK/APBD I	
14	Pemeliharaan Alat PLTS	7 Unit						Menara Indah	100.000.000	APBN / APBD I	
15	Pengadaan LPJU	10 Unit						Kec. Bontoharu	200.000.000	APBN / APBD I	
16	Pengadaan LPJU	10 Unit						Kec. Buki	200.000.000	APBN / APBD I	
17	Pengadaan LPJU	20 Unit						Kec. Bontomatene	400.000.000	APBN / APBD I	
18	Pengadaan LPJU	40 Unit						Kec. Bontosikuyu	800.000.000	APBN / APBD I	
19	Pengadaan LPJU	15 Unit						Kec. Bontomanai	300.000.000	APBN / APBD I	
20	Pemeliharaan LPJU							Sub Sentra Utama Bonehalang	500.000.000	APBD I	
21	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Guadrail)	10 Unit						Kec. Bontoharu	1.000.000.000	APBD I	
22	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Guadrail)	10 Unit						Kec. Bontomanai	1.000.000.000	APBD I	
23	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Guadrail)	1 Unit						Kec. Buki	100.000.000	APBD I	

No.	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
24	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Guadrail)	2 Unit						Kec. Bontomatene	200.000.000	APBD I	
25	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Rambu)	46 Unit						Kec. Benteng	46.000.000	APBD I	
26	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Rambu)	203 Unit						Kec. Bontoharu	203.000.000	APBD I	
27	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Rambu)	316 Unit						Kec. Bontomanai	316.000.000	APBD I	
28	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Rambu)	110 Unit						Kec. Buki	110.000.000	APBD I	
29	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Rambu)	73 Unit						Kec. Bontomatene	73.000.000	APBD I	
30	Pengadaan Perlengkapan Jalan (Rambu)	72 Unit						Kec. Bontosikuyu	72.000.000	APBD I	
31	Pemasangan Jarigan Listrik dan Lampu Jalan Sentra Pengolahan Ikan								2.000.000.000	APBN	
32	Pengadaan Lampu Jalan Kampung Nelayan								200.000.000	APBN / APBD I	
33	Pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Darat Dalam Kawasan									APBN	
34	Pembukaan Rute/Trayek Angkutan Darat menuju Kawasan PDL								200.000.000	APBN / APBD I	
35	Penyediaan Sarana Penunjang , Jembatan Timbang, Pos Jaga Traffic Light dll								1.000.000.000	APBN	
36	Pembangunan Shuttle Bus Dalam Kawasan PDL								500.000.000	APBN / APBD I	
37	Pembangunan Bandara Takabonerate								150.000.000.000	APBN	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian / keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
				Tahun 2020							
			Persentase Capaian Kinerja	%	50,91	63,03	70,28	70,53	71,51	72,31	72,31
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan	%	79,35	83,00	85,00	88,00	91,00	95,00	95,00
3	9	1	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	30,54	30,69	30,77	30,85	30,92	31,00	31,00
3	9	2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	%	N/A	55,73	60,66	63,94	70,50	73,78	73,78
3	9	3	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	%	N/A	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7.2
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs

No				Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
							9	1	2	(a)	Jumlah Bandara
9	1	2	(b)	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Unit	2	2	2	2	2	
9	1	2	(c)	Jumlah Pelabuhan Strategis	Unit	7	7	7	7	7	

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategik dan indikatif sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan / pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Perhubungan, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perlunya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Benteng, 22 September 2021

Kepala Dinas Perhubungan,

Drs. Suardi
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020